

SKRIPSI

**STRATEGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (DPM PTSP) DALAM PENINGKATAN
INVESTASI ASING MELALUI PARADIPLOMASI DI KOTA
MAKASSAR**

Disusun dan Diusulkan Oleh:

Andi Irwandi

Nomor Induk Mahasiswa : 10564 1107216



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

**STRATEGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (DPM PTSP) DALAM PENINGKATAN
INVESTASI ASING MELALUI PARADIPLOMASI DI KOTA
MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diusulkan Oleh

Andi Irwandi

Nomor Induk Mahasiswa : 10564 1107216

Kepada

02/06/2022

1 cap
Smb. Alumni

R/0063/IPM/2214
IRW
s'

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Dalam Peningkatan Investasi Asing Melalui Paradiplomasi Di Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Andi Irwandi

Nomor Induk Mahasiswa : 105641107216

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Abdul Masyar, M.Si


Ahmad Harakan, S.IP. M.HI

Mengetahui,

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan


Dr. H. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Andi Irwandi

Nomor Induk Mahasiswa : 10564 1107216

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 22 mei 2022

Yang Menyatakan,

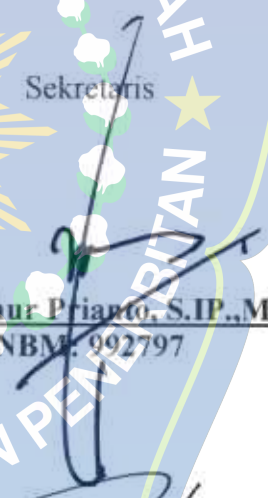


Andi Irwandi

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 018/FSP/A.4-II/II/43/2022 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Jumat 25 Februari 2022.

TIM PENILAI

Ketua	Sekretaris
	
<u>Dr. Hj. Ihvanti Malik, S.Sos., M.Si</u>	<u>Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si</u>
NBM: 730772	NBM: 992797

- TIM PENGUJI**
1. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si (Ketua)
 2. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si
 3. Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP
 4. Hardianto Hawin, ST., M.A
- 

KATA PENGANTAR



“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga meski harus melewati perjuangan yang panjang dan cukup melelahkan namun penulis skripsi yang berjudul : Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Dalam Pelayanan Investasi Asing Melalui Paradiplomasi di Kota Makassar”

Skripsi ini adalah tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Sebagai bentuk karya ilmiah penulis menyadari bahwa banyak menghadapi hambatan dan tantangan selama dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada :

1. Secara khusus dan istimewa penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua saya Ayahanda Andi Muhammad Syukur dan Ibunda A.Rohani S.Pd yang telah mendidik dan membimbing saya dari kecil hingga dewasa dan selalu memberikan dukungan yang sangat berharga.

2. Dr.Abdul Mahsyar, M.SI selaku pembimbing I yang telah sabar dan tak kenal lelah dalam membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Ahmad Harakan S.IP,M.HI selaku pembimbing II yang tak kenal lelah membimbing dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. DR. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan.
8. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Seluruh Civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
10. Kepala bagian DPM PTSP yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan bantuan selama penulis melakukan penelitian.

11. Pimpinan komisariat IMM fisip Unismuh Makassar yang telah menjadi keluarga saya dan selalu memberikan support dan membantu penulis selama kuliah
12. Kakanda dan Adinda Teman-Teman dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP) yang tidak lupa memberikan support dan membantu penulis selama kuliah.
13. Seluruh saudara angkatan Federasi 2016 khususnya Kelas IP B Ilmu Pemerintahan tak terkecuali teman-teman KKP angkatan ke-XXI Fisipol Unismuh Makassar yang telah menjadi keluarga bagi penulis.

Terlalu banyak orang yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, sehingga tidak akan muat bila dicantumkan dan dituturkan semuanya dalam ruang yang terbatas ini, kepada mereka semua tanpa terkecuali penulis ucapkan terimakasih yang teramat dalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Akhir kata penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca guna menambah khasana ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan. Makassar, 24 Januari 2022
Penulis Andi Irwandi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Tinjauan Tentang Strategi	9
1. Strategi	9
2. Investasi Asing	15
3. Konsep Paradiplomasi	21
C. Kerangka Pikir	24
D. Fokus Penelitian	25
E. Deskripsi Penelitian	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	28
B. Jenis Dan Tipe Penelitian	28

C. Sumber Data.....	29
D. Informan Penelitian.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	31
G. Keabsahan Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	35
1. Gambaran Umum Kota Makassar.....	35
2. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar (DPMPTSP).....	37
3. Tugas Pokok Dan Fungsi.....	38
4. Struktur Organisasi.....	40
5. Rencana Strategis DPMPTSP Kota makassar.....	42
B. Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar Dalam Peningkatan Investasi Asing Melalui Paradiplomasi.....	44
1. <i>Corporate Strategy</i> (Strategi Organisasi).....	45
2. <i>Program Strategy</i> (Strategi Program).....	48
3. <i>Resource Support Strategy</i> (Strategi Pendukung Sumber Daya).....	52
4. <i>Institusional Strategy</i> (Strategi Kelembagaan).....	57
C. PEMBAHASAN.....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65

B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	72
RIWAYAT HIDUP	82



ABSTRAK

ANDI IRWANDI, 2022 Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Dalam Meningkatkan Investasi Asing melalui Paradiplomasi di Kota Makassar Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Abdul Mahsyar, dan Ahmad Harakan.

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat, dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dalam Meningkatkan investasi asing melalui paradiplomasi di Kota Makassar. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Strategi Organisasi lebih memperjelas tugas dan fungsi masing-masing aparatur dalam struktur organisasi dengan mengedepankan program-program yang dapat meningkatkan minat investasi di Kota Makassar. Para aparatur harus senantiasa membangun kerjasama dengan dinas-dinas terkait persoalan pembangunan termasuk memudahkan berkas-berkas administrasi agar investasi dapat masuk dengan mudah di Kota Makassar.

Kata Kunci : Strategi, Investasi Asing

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, Makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan pembangunan ekonomi untuk mencapai tujuan Negara. Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional dalam mewujudkan keadilan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi *real* dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri (Frenki, 2011).

Penanaman modal atau investasi sudah diketahui memiliki peran penting bagi kemajuan sebuah daerah. Hal ini dikarenakan investasi merupakan salah satu sektor yang dapat dijadikan sebagai andalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) (Harakan, 2020; Harakan, Mustari, Kinyondo, & Jemsittiparsert, 2021). Dengan adanya investasi turut membentuk jalannya kegiatan perekonomian sehari-hari. Perkembangan investasi disuatu daerah merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat (Purwadi, 2018).

Pengembangan penanaman modal merupakan kebijakan yang

membawa dampak ekonomi yang cukup luas, yaitu terjadinya peningkatan jumlah barang dan jasa, penciptaan nilai tambah, penggunaan tenaga kerja dan sumber daya ekonomi lainnya, peningkatan pendapatan masyarakat serta sebagai sumber pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi. Pengembangan penanaman modal di daerah, selain untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah yang secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, juga akan berdampak positif bagi peningkatan fiskal daerah (Ma'ruf, 2012).

Peningkatan investasi yang dialami oleh Kota Makassar tentunya tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk terus membuat strategi melalui inovasi-inovasi baru dalam meningkatkan pelayanan perizinan penanaman modal (Arya, 2019). Strategi investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan penanaman modal. Strategi dan kebijakan daerah dalam menciptakan iklim kondusif bagi investasi menjadi salah satu tujuan bagi investor luar daerah yang berkeinginan menanamkan modalnya di daerah (Utama, 2013). Hal ini tentunya menuntut pemerintah daerah kota Makassar dalam hal ini adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM- PTSP) Kota Makassar untuk mampu memberikan pelayanan perizinan secara efektif dan efisien bagi para investor. Pemerintah harus mampu melihat permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah dan menjadikan pedoman dalam membuat strategi (Robby, & Tarwini, 2019)

Untuk mencapai suatu sasaran dalam kerangka pencapaian visi dan misi atau tujuan dari DPM-PTSP sendiri maka dibutuhkan rencana kerja strategis yang dirumuskan dalam bentuk dokumen perencanaan sebagai pedoman/penuntun yang dapat memberikan gambaran kondisi yang akan dicapai, dan arah kebijakan. Selain sebagai penentu arah pencapaian dan kebijakan, rencana strategis juga bertujuan untuk memberikan arahan kebutuhan program dan kegiatan prioritas yang jelas hingga pelaksanaan kegiatan bisa terwujud secara efektif, efisien dan optimal. Salah satu strategi DPM-PTSP dalam upaya meningkatkan investasi Asing di Kota Makassar adalah dengan memperbaiki kualitas pelayanan melalui perbaikan prinsip pelayanan (Sari, 2018).

Dalam suatu organisasi, baik organisasi pemerintah ataupun organisasi non pemerintah, strategi merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari organisasi bersangkutan, dikarenakan strategi sangat menentukan sukses dan gagalnya kerja dari organisasi tersebut. Hampir semua organisasi menganggap strategi sangat penting dan khususnya organisasi pemerintah, terutama birokrasi sudah tidak asing lagi dengan istilah strategi. Organisasi pemerintah baik ditingkat nasional maupun tingkat lokal atau daerah termasuk pemerintah desa, terutama dalam mengambil suatu kebijakan ataupun dalam implementasi suatu kebijakan harus memiliki strategi yang bisa menjawab apa persoalan yang terjadi dan mencegah terjadinya persoalan dalam masyarakat (Akib, 2012).

Untuk mencapai berbagai sasaran yang telah diterapkan, setiap

organisasi memerlukan strategi induk. Yang dimaksud dengan strategi induk ialah suatu rencana umum yang bersifat menyeluruh atau komprehensif yang mengandung tentang tindakan-tindakan utama yang apabila terlaksana dengan baik akan berakibat pada tercapainya berbagai sasaran jangka Panjang dalam lingkungan eksternal yang bergerak dinamis.

Adanya globalisasi menjadikan format diplomasi tingkat tinggi berubah menjadi *'the foreign policy and non central government'* yang mengacu pada diplomasi bukan bertumpu *'microdiplomacy'*. Artinya, aktor yang berperan berada di sub sistem negara yakni pemerintah daerah atau yang dikenal dengan istilah paradiplomasi (Fathun, 2016). Paradiplomasi memunculkan aktor-aktor non tradisional seperti kelompok, individu, organisasi, dan sub negara untuk mencapai kepentingannya masing-masing (Irdyantri, 2014). Dengan dasar pemikiran seperti itu paradiplomasi lahir sebagai legitimasi bagi munculnya aktor-aktor baru dalam hubungan internasional. Dengan demikian, diverifikasi peran aktor diplomasi memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk terlibat langsung dalam hubungan internasional. Dengan demikian, diverifikasi peran aktor diplomasi memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk terlibat langsung dalam hubungan internasional seperti investasi, perdagangan, tanpa harus aktif dalam perkara tertentu untuk melapor kepada pemerintah pusat.

Dari uraian diatas mengenai beberapa strategi yang digunakan oleh DPM-PTSP dalam meningkatkan investasi, menjadi menarik untuk diteliti

secara komprehensif strategi yang digunakan oleh DPM-PTSP dalam meningkatkan Investasi Asing di Kota Makassar. Adapun judul dari penelitian ini adalah sebagai berikut: "Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dalam Meningkatkan investasi asing melalui paradiplomasi di Kota Makassar".

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Bagaimana Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) kota Makassar dalam peningkatan investasi asing melalui paradiplomasi.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan penelitian yaitu :

Untuk mengetahui bagaimana Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dalam peningkatan investasi asing melalui paradiplomasi di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsi pemikiran ilmiah

dalam melengkapi kajian- kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian ilmu pemerintahan.

2. Secara praktis

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu dapat menjadi suatu bahan masukan atau evaluasi dalam pelaksanaan strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dalam peningkatan investasi asing melalui paradiplomasi di Kota Makassar



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulisan dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis, namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian dalam penelitiannya yaitu:

No	Nama	Judul Skripsi	Hasil penelitian
1.	Yuhariyatmono	Pengaruh <i>ONE STOP SERVICE POLICY</i> terhadap peningkatan penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta	Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pelayanan perizinan dan non-perizinan dan penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta
2.	Hasnah (2019)	Sistem informasi manajemen perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan berbasis sistem informasi manajemen pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gowa secara umum telah terlaksana cukup baik, terlepas dari beberapa kelemahan yang ada di dalam proses layanannya.

3.	Angga yudisthira, Fitrotun niswan	Manajemen peningkatan investasi asing oleh dinas penanaman modal dan pelayan terpadu satu pintu Kota Surabaya	Strategi	Hasil penelitian menunjukkan manajemen strategi peningkatan investasi yang dilakukan sudah baik. Misi, tujuan dan strategi yang diterapkansudah sesuai dengankebutuhan para investor, analisis eksternal yangdilakukan sudah detail. Kemudian analisis internal yang dilakukan cukup membawa dampak yang positif.
----	--------------------------------------	---	----------	---

Dalam penelitian terdahulu diatas memiliki beberapa perbedaan dan persamaan yang dilakukan oleh peneliti Yuhariyatmono dengan judul '*Pengaruh One Step Service Policy terhadap peningkatan penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta*' lebih berfokus pada peran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Hasna dengan judul '*Sistem Informasi Manajemen Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*' penelitian ini berfokus pada bagaimana sistem yang diterapkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa, dan Angga yudisthira, Fitrotun niswan dengan judul '*Manejemen Strategi peningkatan investasi asing oleh dianas peneneman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Surabaya*' focus penelitian ini bagaimana peningkatan investasi asing di Kota Surabaya.

B. Pengertian, Konsep dan Teori

1. Strategi

Secara etimologi strategi merupakan sesuatu yang berasal dari kata yang dalam bahasa Yunani, *stratego*. Adapun *stratego* yang merupakan terjemahan yang dapat diartikan sebagai “komandan militer” yang berasal dari zaman demokrasi *Athens* (Maimita & Soleh, 2019). Pada umumnya istilah strategi digunakan untuk memenangkan suatu peperangan dalam permasalahan dunia militer yang sebagai cara digunakan untuk memanfaatkan kekuatan militer. Sedangkan terminologi strategi banyak ahli yang telah mengemukakan sudut pandang yang berbeda-beda tentang strategi, namun pada dasar hakikatnya itu mempunyai arti atau makna yang sama yakni pencapaian tujuan secara efektif dan efisien (Sudrajat, 2008).

Menurut pendapat (Rohmadin, 2016) Strategi merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang membuat dampak dalam perkembangan dalam sebuah organisasi. Berbeda dengan pendapat (Wedhasmara, 2014) yang menyatakan bahwa strategi adalah suatu rangkaian dari keputusan atau tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan di implementasikan oleh para jajaran agar sesuatu organisasi dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

(Adisaputro, 2010) memberikan pendapat yang sama mengenai strategi yang dimana menurutnya strategi merupakan tempat sekumpulan dari keputusan manajerial dan merupakan aksi pengambilan keputusan

jangka panjang disuatu perusahaan. Hal tersebut meliputi analisis lingkungan eksternal dan internal, formulasi strategi, implementasi strategi, evaluasi dan kontrol.

a. Tahap-tahap strategi

Tahap strategi merupakan penyelesaian masalah-masalah yang sedang dihadapi dalam pengambilan keputusan yang dibuat untuk menemukan langkah yang tepat dari masalah tersebut. Dalam hal ini agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan, strategi yang dibuat bisa diimplementasikan dalam penyelesaian masalah yang terjadi, sehingga tolak ukur strategi akan dapat diukur dari implementasinya.

Menurut (Pratiwi, 2018) berpendapat bahwa ada dua tahap strategi, kedua tahap strategi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1). Perumusan Menjelaskan tahap pertama dari bagian yang meliputi analisis lingkungan internal maupun eksternal adalah penetapan visi, dan misi, perencanaan dan tujuan strategi. Perumusan strategi bagian dan proses dalam menyusun langkah-langkah yang akan datang agar bisa membangun visi dan misinya dari perumusan tersebut dapat merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut agar tercapainya penyediaan *costumer value* terbaik.
- 2). Pelaksanaan setelah tahap perumusan strategi dapat terselesaikan maka selanjutnya tahap krusial dalam strategi pemerintah adalah tentang pelaksanaan strategi. Pelaksanaan strategi adalah proses dimana strategi dan kebijakan dijalankan melalui pembangunan

struktur, pembangunan program, *budget* dan pelaksanaan.

Pelaksanaan strategi merupakan tahap yang paling sulit dalam proses strategi mengingat banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan di lapangan dan tidak sesuai dengan perkiraan semula.

Keberhasilan dalam strategi tentunya harus didukung perusahaan yang *capable* dengan seorang pemimpin yang solid, kebijaksanaan yang tepat, alokasi sumber daya yang cukup, situasi budaya dan kondisi terhadap keberhasilan dari pelaksanaan strategi. Berdasarkan pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa tahap strategi merupakan langkah-langkah dalam pembuatan kebijakan yang tepat dengan merumuskan visi dan misi dari kebijakan tersebut, kemudian setelah dirumuskan dibutuhkan pelaksanaan yang tepat pula agar strategi dari kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya.

b. Jenis- jenis strategi

Ada beberapa instansi atau organisasi yang menjalankan suatu strategi atau lebih secara bersamaan, namun hal tersebut dapat sangat beresiko dan mengancam jika dijalankan terlalu jauh diperusahaan yang besar dan terdiverfikasi, Strategi kombinasi biasanya digunakan ketika divisi-divisi yang berlainan menjalankan strategi yang berbeda. Adapula instansi pemerintah atau organisasi yang bertahan untuk tetap hidup dengan menggunakan gabungan dari sejumlah strategi divestasi, seperti likuidasi, dan rasionalisasi biaya secara bersamaan. Adapun jenis-jenis strategi adalah sebagai berikut (Hasibuan, 2011):

- 1). Strategi integrasi, strategi integrasi terbagi 2 macam yaitu integrasi ke depan, Integrasi ke belakang, *integrasi horizontal* kadang semuanya disebut sebagai *integrasi vertikal*. Suatu strategi *integrasi vertikal* atau dari atas kebawah dapat memungkinkan perusahaan yang dapat mengendalikan para distributor, pemasok, dan/atau pesaing.
- 2). Strategi intensif, penetrasi pasar, dan pengembangan produk kadang disebut sebagai strategi intensif karena semuanya memerlukan usaha-usaha intensif jika posisi persaingan perusahaan dengan produk yang ada hendak ditingkatkan.
- 3). Strategi diversifikasi, adapun strategi diversifikasi yang harus dipahami, yaitu diversifikasi *horizontal*, *konglomerat* dan *konsentrik*. Menambah produk atau jasa baru yang tidak disebut diversifikasi konglomerat.
- 4). Strategi Defensif, Ada tiga strategi defensif yang perlu diketahui adalah strategi rasionalisasi biaya, divestasi, atau likuidasi. Rasionalisasi Biaya, terjadi ketika suatu organisasi melakukan restrukturisasi melalui penghematan biaya dan aset untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang menurun.

c. Peranan Strategi

Dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, strataegi memiliki peranan yang sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi karena meliputi tindakan dan koordinasi dalam mencapai tujuan. Adapun menurut (Hasibuan, 2011), strategi mencakup 3 peranan penting yaitu:

- 1). Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan Strategi sebagai suatu elemen untuk mencapai kesuksesan, strategi suatu hal yang akan memberikan suatu ikatan hubungan antara hasil-hasil dari ide yang diambil oleh individu atau instansi terkait.
- 2). Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi Strategi memiliki peranan penting sebagai sarana koordinasi dan komunikasi agar untuk memberikan kesamaan arah bagi perusahaan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
- 3). Strategi sebagai target Konsep strategi akan disatukan dengan suatu visi dan misi untuk menuntukan dimana perusahaan berada dalam masa yang akan datang. Menetapkan suatu tujuan dapat membantu seorang individu dapat mendengarkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

d. Prinsip-prinsip mensukseskan strategi

Menurut (Sari, 2017) dalam Salusu menjelaskan tentang petunjuk untuk mensukseskan strategi:

- 1). Strategi harus mempunyai konsistensi dengan lingkungan. Dalam hal ini pembuatan strategi hendaklah jangan bertentangan dengan arus perkembangan masyarakat.
- 2). Organisasi jangan hanya membuat satu strategi, keadaan tersebut tergantung pada ruang lingkup kegiatannya.
- 3). Strategi yang efektif memfokuskan dan menyatukan semua sumber daya dan tidak memisahkannya.

- 4). Strategi harusnya lebih memperhatikan pada sesuatu yang merupakan kekuatannya (*strenghts*) dan tidak hanya pada sesuatu hal yang justru adalahkelemahannya(*weakness*).
- 5). Sumber daya adalah sesuatu yang kritis.
- 6). Penyusunan suatu strategi juga harus memperhitungkan resiko kecil agar nantinya tidak menjadi sebuah ancaman dalam organisasi.
- 7). Strategi hendaknya disusun diatas landasan keberhasilan yang telah dicapai.

e. Tipe-tipe Strategi

Setiap organisasi pasti memiliki strategi untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tipe strategi yang digunakan dalam suatu organisasi tidaklah sama. Ada beberapa strategi yang digunakan dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut (Agusrihal, 2014), tipe - tipe strategi meliputi:

- 1) Strategi Program Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi - implikasi strategi dari program tertentu. Kira - kira apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau di perkenalkan (apa dampaknya bagi sasaran organisasi).
- 2) Strategi Pendukung Sumber Daya Strategisumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan sumber sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya.
- 3) Strategi Kelembagaan Fokus dari strategi institusional ialah

mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif - inisiatif strategi.

Strategi yang dijalankan pada sektor pemerintahan dapat dilihat upaya dari pemerintah dalam membuat strategi agar dapat tercapainya tujuan dimasa depan dengan menganalisis situasi dan kondisi dimasa sekarang dan masa depan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah membuat perbedaan pengelolaan dengan sektor privat. Perbedaan ini terutama disebabkan adanya perbedaan karakteristik.

Menurut (Valentino, 2016), perencanaan strategis disektor publik tidak dilihat sebagai hanya alat analisis untuk kerangka perumusan strategi tetapi juga mencakup kegiatan lain yang perlu dipandang untuk mencapai efektivitasnya.

2. Investasi Asing

Investasi Asing Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (UU RI No. 25 Th 2007 Tentang Penanaman Modal). Pengertian penanaman modal asing di dalam Undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang- undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut (

UU RI No. 1 Th 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (Varlina & Amar, 2019).

Sebagai negara berkembang, Indonesia mengalami beberapa permasalahan salah satunya adalah pembangunan ekonomi. Keterbatasan pembiayaan merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam pembangunan ekonomi. Penanaman modal dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan untuk menutup keterbatasan pembiayaan dalam pembangunan ekonomi Indonesia (Machmud, 2015).

Banyak cara dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan ekonomi, salah satunya dengan cara menarik para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Menurut (Kambono & Marpaung, 2020) dikatakan bahwa investasi merupakan indikator keterbukaan dan ini sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Menurut (Purba, 2020), menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan dana yang besar untuk menjalankan pembangunan nasional, karena Indonesia masih mencari dana untuk pembangunan dalam upaya menyetarakan pembangunan di berbagai sektor dari negara maju, di tingkat *regional* maupun *global*. Oleh karena itu Indonesia memanfaatkan sumber Investasi Asing Langsung (*foreign direct investment*) untuk pembiayaan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Kebijakan investasi tersebut akan terkait langsung dengan penanaman modal asing pada sektor-sektor ekonomi di Indonesia (Mainita & Soleh, 2019).

Penanaman Modal Asing Langsung (*foreign direct investment*)

sangat membantu Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional. Menurut (Khair & Rusydi, 2016) peningkatan investasi melalui peningkatan barang modal dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Penelitian terdahulu di Nigeria oleh (Denny & Dwi, 2016), menyatakan bahwa Investasi Asing Langsung tidak hanya memberikan pengaruh terhadap Negara-negara berkembang seperti Nigeria karena selain memberikan modal yang dibutuhkan untuk investasi, dapat juga meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan keterampilan manajerial serta transfer teknologi.

Foreign Direct Investment (FDI) merupakan suatu investasi jangka panjang bagi negara yang sedang berkembang. Kedatangan penanam modal asing (PMA) dapat membantu pembangunan ekonomi, dalam hal pembangunan modal, menciptakan lapangan pekerjaan dan dengan adanya PMA maka akan tergarap sumber-sumber baru. Investasi merupakan suatu keharusan dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, jika bertambahnya kapasitas pendapatan nasional maka kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa juga semakin bertambah (Dewi & Triaryati, 2015).

Modal asing sangat membantu dalam mengurangi *problem neraca* pembayaran dan tingkat inflasi, jadi memperkuat sektor usaha negara dan sektor usaha swasta domestik (Lubis, 2015) Banyak faktor yang mempengaruhi investasi asing langsung yang dapat membantu pembangunan ekonomi sebuah negara. Pertumbuhan ekonomi adalah salah

satu faktor yang mempengaruhi investasi asing langsung. Menurut (Mainita & Soleh, 2019) dalam analisis makro pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh satu negara diukur dari perimbangan pendapatan nasional *real* yang dicapai satu negara. Suatu perekonomian dikatakan meningkat apabila jumlah barang dan jumlah jasa mengalami peningkatan. Suatu negara dikatakan aktif dalam perdagangan internasional jika nilai total ekspor lebih besar dari pada nilai total impor (Pridavanti, 2013)

Dalam pengertian ekonomi makro investasi dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Investasi *portofolio* . Investasi *portofolio* ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi
2. Investasi langsung atau *foreign direct investment* (FDI) . Investasi langsung yang dikenal dengan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Penanaman Modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
 - a. Kelebihan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah :
 - 1). Sifatnya permanen (jangka panjang),
 - 2). Memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen,
 - 3). Membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja.

Menurut (Malisa & Fakhrudin, 2017) pada investasi langsung,

investor dapat mengendalikan manajemen, biasanya dilakukan oleh perusahaan transnasional dan periode waktunya panjang karena menyangkut barang-barang modal tingkat pertumbuhan pasar, tenaga kerja dan biaya produksi serta infrastruktur yang digunakan cukup besar. Sedangkan pada investasi *portofolio*, investor hanya menyediakan modal keuangan dan tidak terlibat dalam manajemen. Investornya adalah investor institusional, bersifat jangka pendek dan mudah dilikuidasi dengan cara menjual saham yang dibeli.

b. Beberapa faktor yang dijadikan pertimbangan sebelum investor menanamkan modalnya di Indonesia adalah (Malisa & Fakhruddin, 2017):

- 1). Sumber Daya Alam, Apakah sumber daya alam yang tersedia cukup sebagai bahan baku bagi produk yang akan dihasilkan, tentu saja dengan harga yang murah dibanding di tempat lain.
- 2). Sumber daya manusia yang ada mempunyai keterampilan dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan dengan jumlah yang cukup.
- 3). Stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha, Stabilitas politik dan perekonomian ini sangat penting karena mendukung berhasil tidaknya suatu usaha.
- 4). Kemudahan dalam peizinan ini berkaitan dengan peraturan dan Undang-Undang yang dibuat pemerintah.
- 5). Iklim investasi yang kondusif
- 6). Prospek pengembangan di negara penerima modal

- 7). Tingkat perkembangan ekonomi negara penerima modal
 - 8). Stabilitas politik yang memadai
 - 9). Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan investor
 - 10). Aliran modal cenderung mengalir ke Negara-negara dengan tingkat pendapatan perkapita yang tinggi.
 - 11). Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan investasi asing baik yang berupa Undang-undang maupun peraturan diharapkan mampu memberikan keamanan dalam berinvestasi.
- c. Tujuan perusahaan asing dalam kegiatan investasi di Indonesia dimaksudkan untuk (Malisa & Fakhruddin, 2017):
- 1). Mengisi sektor-sektor usaha, dan industri yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta nasional, baik karena alasan teknologi, manajemen, maupun alasan permodalan.
 - 2). Modal asing juga diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat lebih merangsang dan menggerakkan iklim atau kehidupan dunia usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai upaya menembus jaringan pemasaran internasional melalui jaringan yang mereka miliki.
 - 3). Modal asing diharapkan secara langsung dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi Indonesia

Umumnya interaksi tersebut dapat dilakukan oleh negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi atau federasi, dikarenakan adanya desentralisasi. Desentralisasi tentunya secara tidak langsung memberi kebebasan bagi *substate* untuk menentukan kebijakan daerahnya

secara lebih leluasa.

d. Konsep investasi Asing

Konsep Penanaman Modal Asing (FDI) sebenarnya masih belum ada acuan yang baku, namun demikian studi literatur maupun kajian empiris yang pernah dilakukan dapat dipakai sebagai rujukan konsep tersebut. (Naranjo, 2014) yang dimaksud dengan FDI adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri (Turcott, 2016).

3. Konsep Paradiplomasi

Paradiplomasi secara *relative* masih merupakan fenomena baru dalam kajian hubungan internasional (Harakan, 2018; Harakan, Mustari, Abel, 2021a; Harakan, Mustari, Abel, 2021b). Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas '*substate*', dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik. Istilah '*paradiplomacy*' pertama kali diluncurkan dalam perdebatan akademik oleh ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos sebagai penggabungan istilah '*parallel diplomacy*' menjadi '*paradiplomacy*', yang mengacu pada makna '*the foreign policy of non-central governments*', menurut Aldecoa, Keating dan Boyer. Istilah lain yang pernah dilontarkan oleh Ivo Duchacek untuk konsep ini adalah '*micro diplomacy*' (Hikmawan & Maulida, 2019)

Paradiplomasi juga didefinisikan sebagai kapasitas dan partisipasi Negara dalam arena internasional untuk mencapai kepentingan spesifik (Pujayanti, 2016). Dalam paradiplomasi, unit-unit konstituen dari negara berdaulat berusaha untuk mencapai kebutuhan atau kepentingannya sendiri dengan dapat melakukan "keterlibatan diplomatik" dengan negara lain atau unit-unit konstituenya (Harakan, Rahman, & Hartaman, 2021). Aktor subnasional saat ini diakui sebagai aktor internasional, karena mereka mampu menegosiasikan dan menandatangani kesepakatan internasional dengan negara asing dan aktor-aktor non pemerintah, membangun perwakilan di luar negeri, melakukan misi dagang, mencari investasi asing, dan membangun hubungan bilateral maupun multilateral dengan negara negara.

Paradiplomacy dalam kerangka otonomi daerah. Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*) merupakan salah satu bentuk investasi asing baik berupa penanaman modal maupun pendirian industri atau pabrik ke daerah-daerah tertentu di Indonesia. Investasi asing langsung adalah investasi di suatu negara yang berasal dari Negara- negara melalui perusahaan-perusahaan multinasional yang dimiliki oleh pihak swasta (Adibowo & Putri, 2016). Sementara itu, (Lubis, 2015) mengatakan bahwa investasi asing langsung adalah suatu bentuk penanaman modal asing ke dalam aktifitas perekonomian negara lain. Investasi asing langsung biasanya berbentuk fisik misalnya pembangunan pabrik dan melibatkan partisipasi perusahaan. Selain itu, penanaman modal melalui investasi asing langsung

ini juga bersifat jangka panjang.

Hal-hal yang berkaitan erat dengan investasi asing langsung memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan otonomi daerah dimana dalam proses pengelolaan investasi maka para investor akan berhadapan langsung dengan kebijakan yang ada di daerah tersebut sehingga akan berdampak positif bagi proses pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kebanyakan pelaku investasi asing adalah perusahaan multinasional (MNC). Kehadiran MNC sangat mempengaruhi keadaan ekonomi suatu negara, terutama bagi negara dunia ketiga di mana MNC merupakan salah satu sumber modal yang penting bagi pembangunan ekonominya. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967, banyak investor asing dan MNC mulai diundang ke Indonesia. Di tahun yang sama tepatnya bulan April pemerintah Indonesia memberikan izin kepada PT. Freeport Indonesia sebagai MNC pertama yang beroperasi di Indonesia.

Pemerintah daerah sebagai aktor diplomasi. Pada hakekatnya pelayanan pemerintah yang baik terhadap rakyatnya baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap kinerja dan kredibilitas pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan pengambil kebijakan. Menurut (Kurniawan, 2017), "paradigma pemerintahan harus didasarkan pada asumsi bahwa pemerintahan dalam jangkauan masyarakat menitik beratkan pada bentuk pelayanan yang diberikan menjadi lebih cepat, hemat, murah, responsif, akomodatif, inovatif serta produktif.

Diperlukan payung hukum sebagai legalitas pemekaran daerah yang diberi tugas untuk mengelola daerah otonom. Seperti yang sudah di tuliskan sebelumnya pemerintah Indonesia telah memiliki undang-undang otonomi daerah yang menyatakan bahwa daerah sebagai bagian subsistem dari Indonesia dan perpanjangan tangan pemerintah pusat berhak dan legal untuk mengurus daerahnya sendiri dengan memanfaatkan potensinya. Oleh sebab itu, dalam konsep tata pemerintahan daerah (*local government*) disebutkan bahwa otonomi diartikan sebagai mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Wewenang tersebut dimaksudkan supaya tercapai peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokratis, keadilan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat, yang menuju kepada tingkat kemandirian masyarakat daerah serta hubungan harmonis antara pusat dan daerah serta antar daerah (Fathun, 2016).

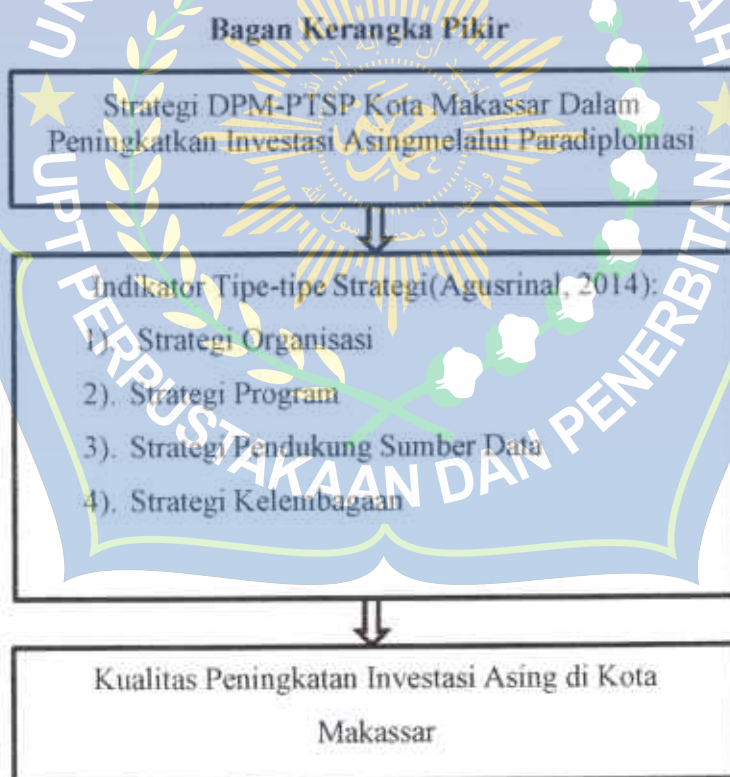
C. Kerangka Pikir

Strategi adalah unsur terpenting pada suatu organisasi atau instansi pemerintah karena strategi merupakan suatu seni atau teknik dalam pengambilan keputusan atau suatu kebijakan yang berdampak 3 sampai 5 tahun kedepan agar nantinya tujuan atau visi misi organisasi atau instansi dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Strategi merupakan sebuah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan pokok suatu organisasi, kebijakan-kebijakan dan tahapan-tahapan kegiatan ke dalam suatu keseluruhan yang bersifat kohesif. Strategi menurut (Idah & Pinilih, 2020) yaitu suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber

daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, strategi merupakan suatu seni dalam menyusun rencana suatu organisasi untuk memastikan tujuan yang ingin dicapai dengan baik dan terlaksana dengan efektif. Strategi tersebut meliputi sumber daya manusia, efisien, efektif, tujuan untuk Meningkatkan Investasi Asing melalui paradiplomasi. Maka tertuanglah bagan kerangka pikir seperti di bawah ini:



D. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Bagaimana Strategi Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Dalam Peningkatan Investasi Asing Melalui Paradiplomasi di Kota Makassar Fokus ini meliputi:

Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Dalam Peningkatan Investasi Asing Melalui Paradiplomasi di Kota Makassar.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Sesuai dengan fokus yang telah ditentukan dalam penelitian terkait Investasi Asing Kota Makassar maka yang menjadi gambaran dari fokus yaitu tipe-tipe strategi Menurut (Agusrinal, 2014) memaparkan bahwa tipe-tipe strategi sebagai berikut:

- 1). Strategi Organisasi Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif inisiatif strategi yang baru. Pembatasan pembatasan diperlukan yaitu mengenai apa yang dilakukan dan untuk siapa.
- 2). Strategi Program Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi implikasi strategi dari program tertentu. Kira-kira apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan (apa dampaknya bagi sasaran organisasi).
- 3). Strategi Pendukung Sumber Daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya.
- 4). Strategi Kelembagaan Fokus dari strategi institusional ialah

mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif

- inisiatif strategi



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penentuan waktu dalam penelitian ini adalah dilaksanakan pasca seminar proposal penelitian dan lokasi penelitian bertempat di Kota Makassar tentang Strategi (DPM-PTSP) Kota Makassar dalam peningkatan investasi asing melalui paradiplomasi. Adapun alasan memilih obyek lokasi penelitian tersebut karena ingin melihat Strategi Pemerintah Daerah dalam peningkatan Investasi asing melalui paradiplomasi di kota Makassar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif dilapangan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan (Sugiyono, 2016). Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu peneliti harus terjun dalam lapangan dalam waktu yang cukup lama.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan studi kasus dimana data dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, baik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari berbagai cara itu hakikatnya untuk saling melengkapi. Ada kalanya data yang diperoleh dari wawancara belum lengkap, sehingga harus dicari lewat cara lain, seperti observasi, dan dokumentasi.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di jaring dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepada bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan penelitian ini dipilih dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan penelitian. Dimana informan ini diharapkan memberikan data secara objektif, netral dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun informan dari penelitian terkait Strategi DPM-PTSP Kota Makassar adalah sebagai berikut:

No	NAMA	INISIAL	JABATAN	KET
1	Andi Agustina SE	AA	KABID PENANAMAN MODAL	1 Orang
2	Nia Ramdani Amsar S.Pd	NRA	KABID PERENCANAAN DAN PENANAMAN MODAL	1 Orang
3	Muhammad Al-Muksin S.Sos	MA	KABID PERENCANAAN DAN INVESTASI	1 Orang
Jumlah				3 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung yang berkaitan dengan Peran Karang Taruna Terhadap Strategi pemerintah daerah dalam peningkatan investasi asing melalui paradiplomasi di kota makassar.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy :103). Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data. Pada tahap kedua, peneliti menyusun kode-kode dan catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Komponen kedua yakni penyajian data (*data display*) melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa bertumpuk, maka penyajian data (*data display*) pada umumnya sangat diyakini sangat membantu proses analisis.

3. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Pada komponen terakhir, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan (*drawing dan verifying conclusions*), peneliti pada dasarnya

mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat.

G. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2014: 39), Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulandata yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu yakni sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada, kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dandokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang

bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Pada bab ini penelitian akan memberikan gambaran umum tentang lembaga tempat penelitian yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar (DPMPTSP). Yang berlokasi Jl. Ahmad Yani No.2, Buloh Gading, Kcc. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

1. Gambaran Umum Kota Makassar

Gambaran umum lokasi penelitian menguraikan tentang kondisi umum dua lokasi penelitian, adapun isi dari bagian ini mencakup letak geografis. Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara $119^{\circ}24'17'38''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}8'6'19''$ Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan $0-2^{\circ}$ (datar) dan kemiringan lahan $3-15^{\circ}$ (bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26°C sampai dengan 29°C .

Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai

"*Waterfront City*" yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang.

Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya.

Batas-batas administrasi Kota Makassar adalah:

- a. Batas Utara: Kabupaten Maros
- b. Batas Timur: Kabupaten Maros
- c. Batas Selatan: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
- d. Batas Barat: Selat Makassar

Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

- a. Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai.
- b. Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang Kecamatan Panakukang.

Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah ke bagian

Timur Kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Panakkukang, dan Rappocini.

2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar (DPMPTSP)

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat, dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel (good governance).

Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban suatu tugas dan tanggung jawab tertentu dengan diberikan kewenangan atau mandat dari masyarakat umum ini perlu akuntabilitas yang baik, memadai, tertib dan teratur. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah diharapkan membantu pimpinan tertinggi pemerintah untuk dapat mempertanggung jawabkan mandat dan kewenangan kepada masyarakat.

Salah satu sistem pertanggung jawaban pemerintah yang ada adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sebagai suatu upaya pertanggungjawaban kepada publik dan kepada pihak-pihak yang memberi mandat.

Proses penyusunan LAKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mewajibkan seluruh instansi pemerintah menyusun laporan Kinerja yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBN/APBD).

Serta dengan memperhatikan permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Lampiran II tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

3. Tugas dan Pokok dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar yang di bentuk berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat

Daerah Kota Makassar, Peraturan Walikota Makassar Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 5 Tahun 2020 tentang pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Termasuk Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

a. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan Daerah pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, serta pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

b. Fungsi

Adapun fungsi dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut : Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintah bidang

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintah bidang penanaman modal dan

4. Struktur Organisasi

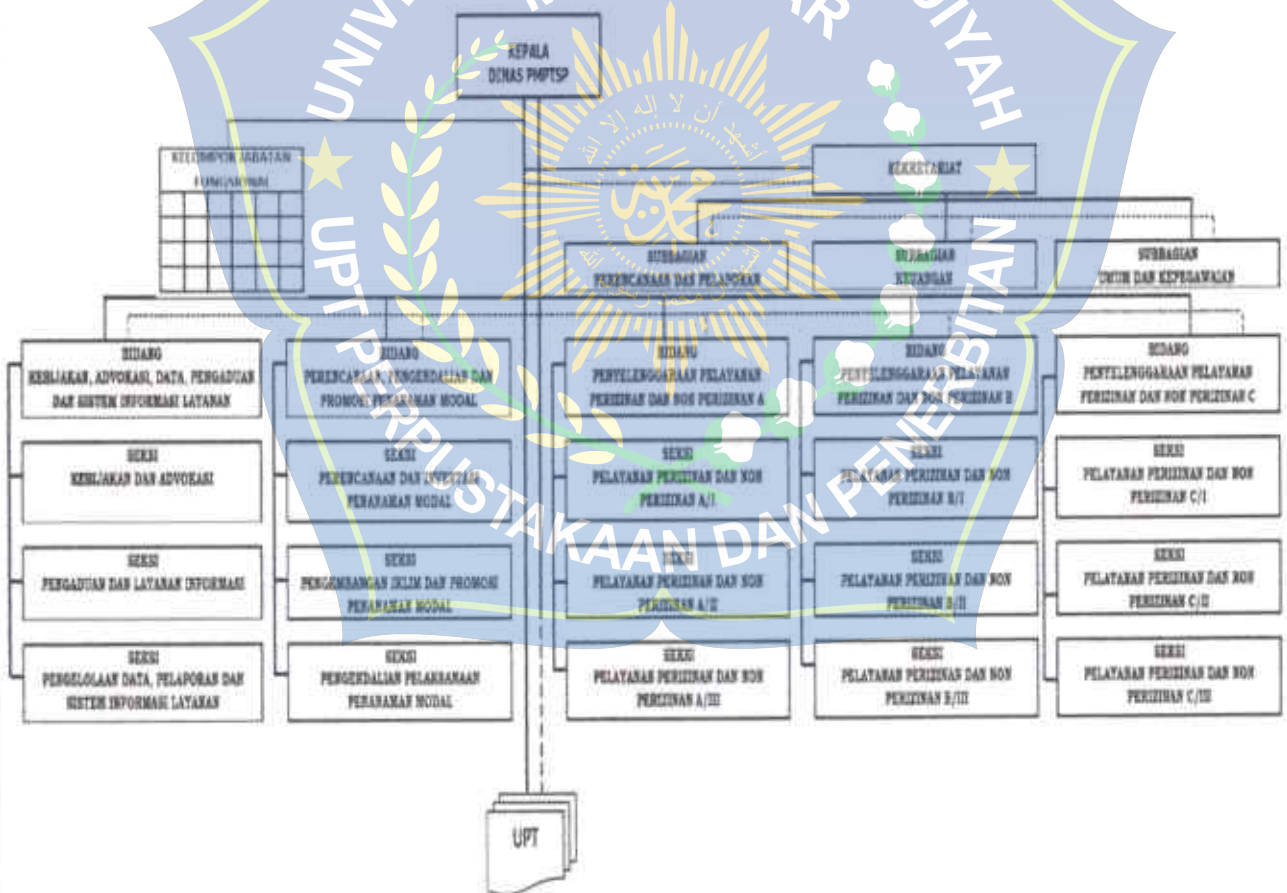
Sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab Kepala Walikota Makassar, maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar mempunyai tugas membantu Walikota Makassar di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Penanaman Modal, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah maka disusun struktur organisasi SKPD berdasarkan Peraturan Walikota. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, kedudukan struktur organisasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar sudah dapat melaksanakan struktur kelembagaan Tipe A, hal ini dikarenakan fungsi pelaksanaan penanaman modal di DPMPSTP Kota Makassar telah mewadahi beban kerja yang besar dengan berlakunya Peraturan Walikota Makassar Nomor 5 Tahun 2020 tentang pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Termasuk Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal dan PTSP juga terkait koordinasi DPMPTSP Kota Makassar dengan KemenpanRB terkait pelaksanaan Mall Pelayanan Publik, sehingga perlu adanya revisi perubahan struktur organisasi di DPMPTSP Kota Makassar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Gambar 4.1 Gambar Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU



Gambar 4.1 Gambar Struktur Organisasi

5. Rencana Strategis DPMPTSP Kota Makassar

a. Visi dan Misi

Visi Berdasarkan pokok visi RPJPD 2005-2025 dalam urusan penyelenggaraan pelayanan publik termasuk dalam visi kota jasa dengan pokok visi yaitu makassar kota niaga dan jasa. Adanya visi dan misi tersebut, sehingga terwujudnya dalam menguatkan daya saing ekonomi kota berbasis perdagangan jasa.

Misi Memberdayakan kekuatan ekonomi masyarakat dan menguatkan daya saing ekonomi kota(M2)

b.★ Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota makassar Mengembangkan Kepemerintahan yang baik dan pelayanan yang memuaskan.

Sasaran dari pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota makassar : tercapainya Tata Kelola Kota Makassar yang baik

Adapun program-program DPMPTSP Kota Makassar dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan DPMPTSP Kota Makassar

No.	Nama Program Kegiatan	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Keterangan
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			

	Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal Online Angkatan I	26 Orang (Perusahaan Pmdn, Umkm)	Bimtek
	Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal Online Angkatan Ii	27 Orang (Perusahaan Pmdn, Umkm)	Bimtek
	Sosialisasi Kemitraan Usaha Angkatan I	28 Orang (Perusahaan Pmdn, Umkm)	Sosialisasi
	Sosialisasi Kemitraan Usaha Angkatan Ii	29 Orang (Perusahaan Pmdn, Umkm)	Sosialisasi
	Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Online Single Submission (Oss)	30 Orang (Perusahaan Pmdn, Umkm)	Bimtek
	Sosialisasi Kemitraan Usaha Angkatan Iii	31 Orang (Perusahaan Pmdn, Umkm)	Sosialisasi
	Sosialisasi Kemitraan Usaha Angkatan Iv	32 Orang (Perusahaan Pmdn, Umkm)	Sosialisasi
Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Pemantauan Penanaman Modal		6 Kali Kegiatan X 12 Perusahaan
Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal		12 Kali Kegiatan X 24 Perusahaan
Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal		Buku Profil Investasi Kota Makassar Sebanyak 100 Buku
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penyediaan Peta Potensi Dan Peluang Usaha Kota Makassar		Buku Peta Potensi Dan Peluang Usaha Kota Makassar Perkecamatan
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Makassar		Draft Dan Sk Walikota Makassar

umber: DPMPTSP Kota Makassar 2022)

B. Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) kota Makassar dalam peningkatan investasi asing melalui paradiplomasi.

Pemerintah daerah perlu berperan dalam mendorong pengembangan investasi guna menciptakan efisiensi dan menciptakan suasana yang kondusif bagi lingkungan investasi. Investasi, terutama dari swasta dalam dan luar negeri ditujukan untuk mempercepat laju pembangunan. Namun, pembangunan daerah tidak dapat didokumentasikan secara terpisah dari dokumen rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah serta agenda yang telah diartikulasikan di negara lain.

Pemerintah Kota Makassar memiliki beberapa sektor unggul dan berdaya saing. Beberapa sektor tersebut diantaranya: sektor pariwisata, perikanan, peternakan, perdagangan, industri. Kota Makassar dalam percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Tentu dalam meningkatkan itu semua Pemerintah Kota Makassar membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pemerintah tidak mungkin mengandalkan pendapatan daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Makassar tentu sangat membutuhkan investor entah itu dari dalam negeri maupun investor dari luar negeri untuk meningkatkan pendapatan daerah yang unggul dan berdaya saing.

Tentunya hal ini memerlukan Pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) yang secara efektif dapat memberikan pelayanan perizinan kepada investor.

Pemerintah daerah harus mampu mengidentifikasi masalah yang ada dan mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikannya serta memberikan arahan untuk perumusan strategi. Pengukuran kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator: strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya dan strategi kelembagaan yang diuraikan dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Strategi Organisasi

Pemerintah mempunyai sebuah organisasi yang dijalankannya dimana, organisasi tersebut terdiri atas sekelompok pegawai. Terbentuknya suatu organisasi dengan tujuan untuk dapat mencapai suatu visi/ misi diinginkan oleh perusahaan. Pencapaian yang diinginkan perusahaan tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi yang ada di dalam perusahaan tersebut, yaitu organisasi yang dijalankannya. Menjalankan suatu organisasi tentunya tidak dapat berjalan apabila hanya terdiri dari satu orang saja, melainkan terdiri dari beberapa sumber daya manusia sebagai penggerak organisasi tersebut.

Pemerintah Kota Makassar dalam menuju kota dunia membutuhkan percepatan pembangunan dengan mendorong investasi asing. Salah satu langkah yang dilakukan dengan perbaikan organisasi melalui visi misi yang akan dilaksanakan oleh struktur organisasi yang ada dalam melaksanakan kegiatan investasi asing. Perbaikan dilakukan dengan menyusun tugas dan fungsi masing-masing stakeholder dalam struktural.

“Terkait organisasi sendiri kita lebih mengedepankan kepada tugas dan fungsi masing-masing aparaturnya yang berada pada struktur yang

telah ditetapkan. Jadi masing-masing aparaturnya sudah mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing tinggal diarahkan apa yang mereka harus kerjakan terlebih terkait melihat potensi yang harus dibangun di Kota Makassar, yang lebih penting hubungan kerjasama dengan dinas-dinas lain terkait pembangunan *smart city*. Terkait investasi asing sendiri fungsi DPM PTSP disini lebih kepada melakukan inovasi dalam memperkenalkan potensi yang ada di kota Makassar, selanjutnya kita mempertegas kualitas para aparaturnya dan yang terpenting *networking* yang berkaitan dengan kerjasama. Karena untuk urusan investasi asing itu bukan menjadi kewenangan daerah sepenuhnya, kegiatan tersebut perlu kerjasama dengan pemerintah pusat.” (Wawancara dengan AA tanggal 11/10/2021)

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan dalam melaksanakan kegiatan investasi dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu Kota Makassar lebih mempertegas tugas dan fungsi para aparaturnya melalui struktur organisasi. Dimana masing-masing stakeholder mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan program-program yang inovatif dengan melihat potensi yang ada di Kota Makassar.

Semua organisasi pasti memiliki tujuan yang akan diwujudkan secara optimal sehingga dapat terealisasi. Tujuan ialah cita-cita yang digantungkan oleh organisasi sebagai pedoman dan rujukan bagi seluruh komponen didalam organisasi. Seperti halnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan berupaya dengan sekuat tenaga untuk menggapai tujuan yang harus dicapainya.

Cara yang akan ditempuh oleh suatu organisasi ialah dengan menggunakan misi yang ada di dalam organisasi. Misi merupakan langkah-langkah untuk merealisasikan tujuan yang sudah ditetapkan. Sehingga misi harus dibuat menyesuaikan dari tujuan yang akan dituju Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.

“Dalam menjadikan Kota Makassar sebagai daerah tujuan investasi guna peningkatan pembangunan maka perlu dituangkan dalam misi organisasi melalui pelayanan yang mudah, murah, bersih, cepat dan pasti melalui peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas SDM. Mewujudkan kota Makassar sebagai kota tujuan investasi melalui promosi investasi di dalam maupun luar negeri. Hal tersebut merupakan beberapa strategi yang menjadi acuan bagi DPM PTSP Kota Makassar dalam meningkatkan investasi asing.” (Wawancara dengan NRA tanggal 11/10/2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dalam menjalankan fungsi organisasinya berdasarkan misi yang telah ditetapkan dan sudah menjadi tanggung jawab dari setiap aparatur guna merealisasikan misi tersebut melalui program-program yang inovatif.

Pemerintah Daerah dapat merealisasikan visi dan misi serta rencana-rencana pembangunan wilayah dengan menggerakkan kehadiran industri-industri andalan maupun kegiatan produksi dan perdagangan. Kegiatan investasi ini kemudian akan mendorong dan membantu pengembangan kegiatan ekonomi daerah. Penanaman modal yang dilakukan oleh investor menjadi salah satu faktor yang meningkatkan ekonomi daerah. Peluang-peluang ekonomi yang tersedia kini semakin besar dan ini merupakan tantangan dalam perubahan-perubahan yang begitu cepat. Namun, semua ini sangat tergantung kepada kemampuan pemerintah daerah dalam berpikir, bersikap, bertindak kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan peluang-peluang tersebut.

Masyarakat kota Makassar menilai pemerintah dalam membuka peluang investasi guna melakukan percepatan pembangunan harus

senantiasa memperhatikan kondisi tata ruang wilayah dan pembukaan lapangan kerja. Pembangunan di Kota Makassar yang semakin pesat menjadikan beberapa wilayah terkesan kumuh dan tidak dapat memobilisasi tenaga kerja yang berasal dari Kota Makassar.

“Masuknya investasi di daerah kita tentu sangat baik dalam memperbaiki kualitas perekonomian di Kota Makassar. Namun masih ada beberapa kondisi yang kurang diperhatikan oleh pemerintah termasuk masalah lingkungan. Kita lihat saja pembangunan terus dilakukan tanpa memperhatikan drainase sehingga pada saat musim hujan terjadi banjir. Hal yang paling mengecewakan lagi kalau ada pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan itu justru membawa tenaga kerja dari luar, sementara disinikan masih banyak yang menganggur. Kedepan saya fikir jika memang alasannya kualitas sumber daya masyarakat kurang baik yah dibukakan lah pelatihan serta perlu penguatan regulasi agar masyarakat kita di Kota Makassar ini benar-benar terbackup, tidak hanya menjadi buruh kasar.” (Wawancara dengan MA tanggal 15/10/2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam membuka investasi di Kota Makassar perlu meningkatkan kualitas lingkungan dan penyerapan tenaga kerja sehingga cita-cita investasi yang memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat benar-benar terwujud.

2. Strategi Program

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan investasi di Indonesia. Upaya-upaya tersebut diantaranya adalah dengan melakukan kerjasama bilateral maupun multilateral dengan Negara-negara sahabat agar Negara mereka mau melakukan investasi di Indonesia, mengadakan forum-forum dengan para pengusaha agar mereka mau meningkatkan investasi, membuat regulasi-regulasi yang semakin

memudahkan proses penanaman investasi di Indonesia.

Makassar menjadi salah satu tuan rumah ASEAN Mayor Forum yang berlangsung pada 9-11 September 2015. Kegiatan ini adalah dibentuk oleh sejumlah negara-negara ASEAN untuk menyambut masyarakat ekonomi ASEAN yang akan mulai berlaku pada Desember 2015. Kegiatan ini merupakan forum diskusi insan muda, kreatif, akademisi, praktisi, LSM dan aktor lainnya untuk menyiapkan Indonesia menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pembentukan Komunitas ASEAN sebelumnya direncanakan pada 2020 kemudian dimajukan pada 2015 untuk mempercepat integrasi antar sesama negara ASEAN.

"Pada Tahun 2015 Kota Makassar ditunjuk sebagai penyelenggara ASEAN Mayor Forum. Hal ini tentu saja bisa menjadi bagian diplomasi ekonomi untuk menarik investasi asing. Forum ini bisa menjadi agenda konsultasi terkait bagaimana mempersiapkan tiga pilar Komunitas ASEAN. Penyelenggaraan pertemuan berskala internasional semacam ini bisa membuka peluang untuk pertemuan-pertemuan lainnya. Dengan dukungan *smart city*, *smart people* dan *smart plan* Makassar bisa menjadi salah satu *center for international negotiation forum*. Dengan basis kota modern Makassar bisa menjadi pilihan dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan penting dalam hal diplomasi dan negosiasi" (Wawancara dengan MA tanggal 11/10/2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan dalam rangka membuka peluang bagi investasi di Kota Makassar, pemerintah terus mendorong program-program kerjasama luar negeri sebagai ruang dalam mendorong investasi asing di Kota Makassar.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan investasi di Indonesia adalah mengambil kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif ditandai dengan peningkatan

pengeluaran pemerintah. Salah satu tujuan peningkatan pengeluaran pemerintah ini adalah untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah, tentu anggaran untuk membuat sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan investasi bisa lebih besar. Sarana dan prasarana tadi bisa berupa jalan, rel kereta api, pelabuhan, pembangkit listrik, dll.

Beberapa program telah direncanakan bahkan sudah ada yang masuk pada tahap pelaksanaan sebagai upaya dalam meningkatkan investasi asing di Kota Makassar. Program yang mengarah kepada peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat tersebut dapat menjadi opsi bagi investasi asing dalam menanamkan modalnya di Kota Makassar.

“Dalam menggiatkan masuknya investasi asing dibentuklah Makassar Investment Forum (MIF). Dalam diskusi tersebut Pemerintah Kota Makassar bersama sejumlah mitranya menginginkan Makassar menjadi *Center Point* di Indonesia, *research university* dan bahkan menjadi industrial park. Untuk itu dibutuhkan dana sekitar US\$ 2,35 miliar untuk membangun jalan tol, jalan umum sepanjang 40 kilometer, serta jalur kereta api Makassar menuju Pare-Pare. Sehingga, dengan program smart city ini diharapkan bisa menjadi mutiara yang mengundang ketertarikan investor asing untuk menanamkan modalnya.” (Wawancara dengan AA tanggal 11/10/2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan melalui forum diskusi MIF menjadi program awal yang diinisiasi pemerintah Kota Makassar dalam mendorong para pengusaha agar menanamkan modalnya guna kegiatan pembangunan di Kota Makassar. Kegiatan yang mengacu kepada pelaksanaan kerjasama dengan investor tersebut dapat lebih

memudahkan pemerintah dalam mempromosikan potensi pembangunan diwilayahnya.

Secara umum, program pembangunan ekonomi daerah yaitu suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Arah ataupun tujuan yang akan di tuju untuk dijadikan sebagai fokus pembangunan suatu daerah diawali dengan menentukan skala prioritas isu-isu permasalahan yang ada. Isu-isu pembentuk ini biasanya merupakan isu-isu fundamental di masyarakat yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti kemiskinan, pengangguran, Pendidikan, infrastruktur dan sebagainya.

Pemerintah Kota Makassar bertindak sebagai kordinator artinya pemerintah bertindak untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan kota yang lainnya. Kemudian, peran kordinator pemerintah dalam pembangunan ekonomi dapat melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam mengumpulkan dan mengevaluasi informasi-informasi ekonomi seperti tingkat ketersediaan pekerjaan, angkatan kerja, pengangguran, dan jumlah perusahaan. Dapat juga bekerja sama dengan Lembaga pemerintah, yaitu sebuah perencanaan yang disusun sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya.

“Tentu dengan banyaknya investasi yang masuk di Kota Makassar pemerintah perlu meningkatkan pemberdayaan terhadap masyarakat. Program seperti pendataan angkatan kerja harus dilakukan agar semua masyarakat dapat diberdayakan dalam kegiatan pembangunan. Persoalan yang terjadi hari ini lebih kepada tingginya angka pengangguran di Kota Makassar yang berpengaruh terhadap perilaku sosial masyarakat.” (Wawancara dengan MA tanggal 15/10/2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan dalam rangka meningkatkan investasi di Kota Makassar harus sejalan dengan program-program pemerintah kota yang mengarah terhadap pembukaan akses lapangan kerja bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah sebagai pihak pemangku kebijakan di Kota Makassar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Investasi yang masuk ke Kota Makassar mulai membaik pada semester pertama 2021, peningkatan investasi asing yang terjadi cukup signifikan meski masih ditengah pandemi Covid-19. Investasi yang masuk mulai meningkat pada semester pertama tahun ini.” (wawancara dengan MA tanggal 23/02/2022).

Hasil wawancara dengan Informan dapat disimpulkan bahwa peningkatan Investasi asing terus meningkat meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19.

3. Strategi Pendukung Sumber Daya

Pemerintah daerah dengan berbekal undang-undang otonomi daerah dan sejumlah aturan teknis dalam melakukan hubungan luar negeri dan kerjasama internasional menjadikan pemerintah daerah mampu berperan sebagai '*diplomat*' yang memiliki kapasitas untuk memperjuangkan kepentingan daerah di ranah internasional. Selama ini *diplomat-diplomat* resmi terkesan sangat lamban dalam merespon kepentingan daerah apabila

sejumlah investor asing ingin menanamkan modalnya sebab harus memasuki pintu Kementerian Luar Negeri terlebih dahulu. Untuk menangkap peluang yang ada, pemerintah daerah harus melakukan langkah 'potong kompas' dengan secara aktif melakukan hubungan luar negeri sesuai ketentuan undang-undang.

Memberikan pelatihan terhadap sumber daya aparatur yang ada pada dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu di Kota Makassar merupakan salah satu langkah agar apratur dapat memahami dan mengarahkan program yang dapat membuka peluang investasi asing di Kota Makassar.

"Strategi dalam memanfaatkan sumber daya yang ada melalui pelatihan menjadi paradiplomasi. Sehingga para aparatur kita kedepan sudah siap dalam mempromosikan Kota Makassar agar menarik investasi asing di Kota Makassar. Kemudian megedepankan pendekatan teknologi dengan promosi *e-diplomacy* melalui halaman situs Pemerintah Kota Makassar dan SKPD setiap investor atau para pelancong sudah bisa melihat secara langsung kondisi geografis, latar belakang kota, peluang investasi, tempat wisata, keadaan politik dan hukum." (Wawancara dengan AA tanggal 11/10/2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan para aparatur telah dibekali pengetahuan dalam mempromosikan kegiatan pembangunan di Kota Makassar sehingga dapat menarik investasi. Kegiatan tersebut juga dipadukan dengan pendekatan teknologi informasi sehingga paradiplomasi dapat dengan mudah membangun hubungan kerjasama dengan para investor asing.

Strategi pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dalam peningkatan organisasi yaitu rekrutmen sumber daya manusia, program

pendidikan dan pelatihan, manajemen kepemimpinan dan motivasi anggota. Berdasarkan strategi tersebut pengembangan sumber daya insani bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi dan untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan.

DPM PTSP Kota Makassar diwujudkan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. Dalam bidang pendidikan, kepala dinas mendorong dan memotivasi para pejabat maupun staf ASN maupun Non ASN untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik menggunakan biaya negara maupun biaya sendiri. Lebih jauh Kepala DPMPTSP Kota Makassar mengatakan, bahwa saat ini kedudukan ASN maupun Non ASN dalam lingkup pemerintah daerah, sangat kuat pengaruhnya dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dan keberhasilan ataupun kegagalan kepala daerah dalam membangun daerahnya sangat tergantung dari kinerja pegawai.

“Dalam hal peningkatan pelayanan pada para pelaku usaha dan masyarakat, yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia terkait perihal pengajuan permohonan izin di DPM PTSP Kota Makassar telah berupaya menggunakan suatu program aplikasi yang disebut *Online Single Submission (OSS)*. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Bidang Perijinan dan Non Perijinan, bahwa OSS yang ada di DPMPTSP Kota Makassar ini adalah suatu system yang dibuat oleh suatu lembaga OSS untuk dan atas nama bupati yang ditujukan kepada pelaku usaha melalui *system* elektronik yang terintegrasi. Namun meskipun demikian lanjut beliau, masih ada beberapa sektor tertentu yang mengharuskan perizinan usahanya diurus melalui dan diterbitkan oleh Badan Koordinasi Pasar Modal (BKPM) maupun instansi pemerintah lainnya yang berwenang tanpa melalui OSS. Seperti izin pada sektor keuangan, energi dan sumber daya mineral, *real estate*, dan izin yang berkaitan dengan perwakilan perusahaan asing.” (Wawancara dengan MA tanggal 11/10/2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan kegiatan

pengembangan sumber daya manusia di DPM PTSP Kota Makassar menggunakan pendekatan sebuah aplikasi. Dengan demikian hal tersebut dapat memudahkan para aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan membuka investasi bagi investor asing.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara disebutkan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan. Sesuai dengan pasal 16 Permenpa-RB No. 38/2017 disebutkan Standar Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud menjadi acuan paling sedikit untuk perencanaan aparatur sipil Negara, pengadaan aparatur sipil Negara, pengembangan karier aparatur sipil Negara, pengembangan kompetensi aparatur sipil Negara, penempatan aparatur sipil Negara, promosi dan/atau mutasi aparatur sipil Negara, uji kompetensi aparatur sipil Negara, sistem informasi manajemen aparatur sipil negara dan kelompok rencana suksesi (talent pool) aparatur sipil Negara.

Dalam hal pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, hal ini erat kaitannya dengan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, serta perencanaan dan analisis kebutuhan sumber daya manusia. Untuk itu guna memaksimalkan pengembangan kompetensi SDM

di DPM PTSP Kota Makassar, adalah dengan memaksimalkan anggaran yang berfokus pada pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.

"Kepala dinas selaku pimpinan tertinggi di organisasi ini harus berupaya semaksimal mungkin mencari solusi dalam hal penganggaran. Pembagian porsi anggaran pada setiap anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD DPM PTSP Kota Makassar harus dilihat dari segi efektivitas penggunaannya yang sangat mendesak tanpa mengabaikan kegiatan lainnya. Hal ini bertujuan agar setiap pegawai dalam lingkup DPM PTSP dapat mengikuti diklat maupun seminar baik didalam maupun diluar propinsi." (Wawancara dengan NRA tanggal 11/10/2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu lebih mendorong penggunaan anggaran dalam mengirim para aparatur untuk mengikuti pelatihan dan seminar. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas aparatur dalam mencapai tujuan organisasi.

4. Strategi Kelembagaan

Perkembangan interaksi antar negara saat ini yang telah melibatkan pemerintahan kota memunculkan konsekuensi logis dari yakni hadirnya diplomasi multijalur yang pada praktiknya menggunakan seluruh komponen negara di dalam melakukan hubungan kerja sama internasional. Pada tingkat *sub state*, diplomasi multijalur atau *multitrack diplomacy* ini diimplementasikan melalui desentralisasi yang diberikan kepada pemerintah kota melalui kewenangan yang telah diberikan oleh pusat.

Paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar memiliki arti penting tidak saja bagi pemerintah kota itu sendiri untuk

mengembangkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya, melainkan juga mendukung diplomasi total yang dilakukan oleh pemerintah pusat bagi pencapaian kepentingan nasional Indonesia.

“Jadi begini kegiatan paradiplomasi itu dikarenakan ada daerah yang sulit dijangkau oleh pemerintah pusat karena faktor geografis dan kendala teknologi informasi dengan mudahnya dapat dijangkau oleh Pemerintah Kota. Tugas pemerintah kota kemudian mempromosikan potensi ekonomi lokalnya dengan melakukan kerja sama ke luar negeri sehingga dapat menambah PDRB setempat yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.” (Wawancara dengan NRA tanggal 11/10/2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pemerintah kota Makassar memiliki strategi tersendiri dalam membuka peluang investasi. Adanya otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah dan kota tidak lagi bergantung dengan pemerintah pusat, sehingga melalui paradiplomasi aktor-aktor yang ada di daerah dapat melakukan promosi potensi daerahnya masing-masing sehingga dapat menarik minat investor.

Jika kita memaknai peran Pemerintah Kota dalam melaksanakan kerja sama dengan luar negeri, maka dapat diketahui bahwa peran tersebut memang memiliki batas-batas yang tidak boleh dilewati yang telah diatur oleh Kementerian Luar Negeri. Namun demikian, selain pedoman umum kota dalam melakukan kerja sama luar negeri yang telah ditentukan oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri pun memiliki aturan terkait dengan aktivitas pemerintah kota jika ingin melakukan kerja sama luar negeri. Aturan tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.

Aturan tersebut juga, terdapat syarat dimana pemerintah kota Makassar harus melaksanakan kerja sama internasional secara aman dari berbagai aspek yaitu aspek politis dimana dalam pelaksanaan hubungan luar negeri Pemerintah Kota Makassar tidak bertentangan dengan Politik Luar Negeri dan kebijakan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Pusat pada umumnya.

"Pemerintah Kota Makassar dan daerah-daerah yang lain tentu memiliki batasan kewenangan dalam membangun hubungan diplomasi terhadap investor yang berasal dari luar negeri. Sehingga salah satu strategy kami dalam meningkatkan investasi di Kota Makassar melalui program *smart city*. Konsep *smart city* merupakan sebuah bentuk strategi kebijakan yang diterapkan untuk menjawab ekspektasi masyarakat dengan semakin majunya dunia oleh teknologi informasi. Dengan tuntutan itu, masyarakat memiliki obsesi untuk menikmati kota yang bisa melayani dengan cepat, tepat dan efisien. Ada sejumlah peluang yang dihasilkan dari adanya program *smart city* di Makassar yakni menjadi kota dunia (*global city*), menjadi kota forum diplomasi internasional, melatih pejabat daerah dan beberapa aktor lain untuk menjadi diplomat (*paradiplomasi*), dan kesempatan kerjasama *Sister City*." (Wawancara dengan AA tanggal 11/10/2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan melalui program *smart city* yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Makassar menjadi salah satu strategi dalam membangun hubungan internasional yang tentunya akan mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Adanya keterbatasan wewenang pemerintah Kota Makassar dalam membangun hubungan internasional maka dilakukan strategi yang kemudian dibentuk agar dapat menarik investasi asing.

Tugas pemerintah salah satunya adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan sehubungan dengan hal tersebut, yaitu mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan

Komunikasi. Kemajuan teknologi informasi juga memberikan dampak bagi pemerintah khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik.

Dalam upaya tersebut Pemerintah Kota Makassar menciptakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. 42 SKPD telah diintegrasikan untuk menciptakan pelayanan yang lebih efisien kepada masyarakat. Pada prakteknya seperti *e-KTP*, *e-karcis*, *e-office*, *e-dokter*, dan merencanakan pembuatan sebuah *smartphone* yang bisa mendeteksi arah jalan macet, keadaan situasi kota dan keamanan kota dan lain-lain. Tentunya program ini sangat baik sebagai langkah awal mencoba membuktikan slogan Makassar sebelumnya yakni menjadi *smart city*.

"Di era sekarang ini memang pemerintah dituntut lebih kreatif dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Saya lihat perkembangan Kota Makassar dari segi aspek pelayanan publik itu semakin baik dengan penggunaan teknologi. Tentu jika itu terus dikembangkan para investor asing pasti akan memilih Kota Makassar sebagai tempat untuk berinvestasi." (Wawancara dengan MA tanggal 15/10/2021).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah Kota Makassar yang memaksimalkan penggunaan teknologi dalam kegiatan pelayanan publik menjadi sebuah *support system* dalam menjalankan kegiatan pelayanan yang lebih baik. Sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat terus dikembangkan sehingga menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Kota Makassar.

C. Pembahasan

Berikut ini akan dibahas mengenai tentang Strategi Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam peningkatan Investasi Asing melalui para Diplomasi di Kota Makassar, dengan berdasarkan pada Indikator tipe-tipe Strategi dari Agusrinal (2014), yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan strategi kelembagaan.

1. Strategi Organisasi

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan mengenai apa yang dilakukan dan untuk siapa.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait strategi organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) kota Makassar dalam peningkatan investasi asing melalui paradiplomasi dimana lebih memperjelas tugas dan fungsi masing-masing aparatur dalam struktur organisasi dengan mengedepankan program-program yang dapat meningkatkan minat investasi di Kota Makassar. Investasi Asing membuka lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran berkurang. Para aparatur harus senantiasa membangun kerjasama dengan dinas-dinas terkait persoalan pembangunan termasuk memudahkan berkas-berkas administrasi agar investasi dapat masuk dengan mudah di Kota Makassar.

2. Strategi Program

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan investasi di Indonesia. Upaya-upaya tersebut diantaranya adalah dengan melakukan kerjasama bilateral maupun multilateral dengan Negara-negara

sahabat agar Negara mereka mau melakukan investasi di Indonesia, mengadakan forum-forum dengan para pengusaha agar mereka mau meningkatkan investasi, membuat regulasi-regulasi yang semakin memudahkan proses penanaman investasi di Indonesia.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terkait Strategi Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) kota Makassar dalam peningkatan investasi asing melalui paradiplomasi dapat dilihat bahwa pemerintah Kota Makassar mendorong program-program pembangunan dalam menyediakan sarana dan prasarana guna meningkatkan mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Pemerintah Kota Makassar menggali potensi-potensi yang dapat dikembangkan dalam menjadikan Makassar sebagai *smart city*. Melalui pembentukan forum kerjasama dengan berbagai investor membuka peluang bagi investasi asing di Kota Makassar.

3. Strategi Pendukung Sumber Data

Pemerintah daerah dengan berbekal undang-undang otonomi daerah dan sejumlah aturan teknis dalam melakukan hubungan luar negeri dan kerjasama internasional menjadikan pemerintah daerah mampu berperan sebagai '*diplomat*' yang memiliki kapasitas untuk memperjuangkan kepentingan daerah di ranah internasional. Selama ini *diplomat-diplomat* resmi terkesan sangat lamban dalam merespon kepentingan daerah apabila sejumlah investor asing ingin menanamkan modalnya sebab harus memasuki pintu Kementerian Luar Negeri terlebih dahulu. Untuk menangkap peluang

yang ada, pemerintah daerah harus melakukan langkah 'potong kompas' dengan secara aktif melakukan hubungan luar negeri sesuai ketentuan undang-undang.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait Strategi Pendukung Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) kota Makassar dalam peningkatan investasi asing melalui paradiplomasi dimana setiap aparatur diwajibkan mengikuti kegiatan pelatihan dan seminar terkait menjadi paradiplomasi yang baik agar dapat meningkatkan kapasitas dalam rangka membuka investasi asing di Kota Makassar. Realisasi penggunaan anggaran untuk kegiatan pelatihan pegawai menjadi sangat penting untuk diperhatikan, terlebih di era globalisasi kegiatan pemerintahan senantiasa membutuhkan pendekatan teknologi informasi.

4. Strategi Kelembagaan

Perkembangan interaksi antar negara saat ini yang telah melibatkan pemerintahan kota memunculkan konsekuensi logis dari yakni hadirnya diplomasi multijalur yang pada praktiknya menggunakan seluruh komponen negara di dalam melakukan hubungan kerja sama internasional. Pada tingkat *sub state*, diplomasi multijalur atau *multitrack diplomacy* ini diimplementasikan melalui desentralisasi yang diberikan kepada pemerintah kota melalui kewenangan yang telah diberikan oleh pusat.

Dalam sebuah lembaga dalam mendapatkan investasi asing perlu melakukan pendaftaran Online melalui OSS (*Online Single Submission*)

untuk mendapatkan (Nomor Induk Berusaha) dan Izin Operasional atau Komersial.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait Strategi Kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) kota Makassar dalam peningkatan investasi asing melalui paradiplomasi dimana setiap aparaturnya diberikan pelatihan khusus dalam melakukan kegiatan paradiplomasi sehingga memahami segala potensi yang dapat dikembangkan dalam menarik investor. Beberapa program-program juga dibuat oleh pemerintah Kota Makassar agar meningkatkan kerjasama dengan investor asing seperti pembangunan kota berbasis *smart city*. Program tersebut merupakan langkah bagi pemerintah kota Makassar dalam meningkatkan minat investor agar mau bekerjasama dengan pemerintah Kota Makassar dalam rangka pembangunan di bidang teknologi informasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait penelitian Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) kota Makassar dalam peningkatan investasi asing melalui paradiplomasi maka dapat disimpulkan:

1. Strategi Organisasi lebih memperjelas tugas dan fungsi masing-masing aparatur dalam struktur organisasi dengan mengedepankan program-program yang dapat meningkatkan minat investasi di Kota Makassar. Para aparatur harus senantiasa membangun kerjasama dengan dinas-dinas terkait persoalan pembangunan termasuk memudahkan berkas-berkas administrasi agar investasi dapat masuk dengan mudah di Kota Makassar.
2. Strategi Program dapat dilihat bahwa pemerintah Kota Makassar mendorong program-program pembangunan dalam menyediakan sarana dan prasarana guna meningkatkan mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Pemerintah Kota Makassar menggali potensi-potensi yang dapat dikembangkan dalam menjadikan Makassar sebagai *smart city*. Melalui pembentukan forum kerjasama dengan berbagai investor membuka peluang bagi investasi asing di Kota Makassar.

3. Strategi Pendukung Sumber Daya dimana setiap aparatur diwajibkan mengikuti kegiatan pelatihan dan seminar terkait menjadi paradiplomasi yang baik agar dapat meningkatkan kapasitas dalam rangka membuka investasi asing di Kota Makassar.
4. Strategi Kelembagaan Beberapa program-program dibuat oleh pemerintah Kota Makassar agar meningkatkan kerjasama dengan investor asing seperti pembangunan kota berbasis *smart city*. Program tersebut merupakan langkah bagi pemerintah kota Makassar dalam meningkatkan minat investor agar mau bekerjasama dengan pemerintah Kota Makassar dalam rangka pembangunan di bidang teknologi informasi.

B. Saran

Adapun saran terkait penelitian terkait penelitian Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) kota Makassar dalam peningkatan investasi asing melalui paradiplomasi yaitu:

1. Sebagai pemberi pelayanan publik akan lebih efektif apabila diberikan kewenangan secara penuh dalam penerbitan perijinan dengan disediakannya tim teknis yang benar-benar kompeten pada perihal perijinan dan penempatan tim teknis langsung pada DPM-PTSP Kota Makassar.
2. Pemerintah Kota Makassar perlu kembali menata kelembagaan dan penyiapan sumber daya manusia yang ada didalamnya secara serius agar pejabat yang menangani urusan kerjasama dengan pihak asing ini

memiliki kemampuan operasional dan konseptual secara professional sehingga mampu mengimbangi kecakapan para birokrat dari pihak asing.

3. DPM-PTSP Kota Makassar perlu membentuk perjanjian dengan perusahaan yang melakukan investasi di Kota Makassar agar melakukan perekrutan karyawan berasal dari masyarakat Kota Makassar agar lebih memperluas lapangan kerja.



Daftar Pustaka

- Adibowo, R., & Putri, S. O. (2016). Penerapan E Government Dalam Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*.
- Adisaputro, G. (2010). Manajemen Pemasaran Analisis Untuk Perancangan Strategi Pemasaran. *UPP STIM YKPN*.
- Agusrinal, D. D. (2014). Perancangan Strategi Pemasaran Pada Produk Anyaman Pandan. *Jurnal Sams, Teknologi Dan Industri*.
- Akib, H. (2012). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289>
- Arya, F. A. (2019). Strategi Inovasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, "AJEP," 3 (1), 56–57.
- Denny, H. P., & Dwi, M. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Dengan Arus Kas Operasi Sebagai Variabel Kontrol (Studi. *Jurnal Akuntansi*.
- Dewi, P., & Triaryati, N. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga Dan Pajak Terhadap Investasi Asing Langsung. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*.
- Dion Eko Valentino, S.S., M.Kom. (2016). Analisis Perencanaan Strategis Sistem Informasi. *Tematik*. <https://doi.org/10.38204/tematik.v3i2.86>
- Fathun, L. M. (2016). Paradiplomasi Menuju Kota Dunia: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar. *Indonesian Perspective*.
- Frenki, F. (2011). Politik hukum dan perannya dalam pembangunan hukum di indonesia pasca reformasi. *Jurnal Asas*.
- Harakan, A. (2018). PARADIPLOMASI DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR FISIK DAN SOSIAL DI KABUPATEN BANTAENG. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 3(1), 1-15.
- Harakan, A. (2020). *Paradiplomasi Investasi*. Yogyakarta: Samudera Biru.
- Harakan, A., Rahman, M., & Hartaman, N. (2021). Paradiplomacy in Improving the Quality of Hygiene Management in Bantaeng, Indonesia. *Psychology and Education Journal*, 58(2), 2392-2399.

Harakan, A., Mustari, N., Kinyondo, A. A., & Jermisittiparsert, K. (2021). How do Local Governments Communicate and Facilitate the Implementation of Investment Paradiplomacy?. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 12(6).

Harakan, A., Mustari, N., & Abel, A. K. (2021). Improving the Quality of City Cleanliness through Investment Paradiplomacy in Bantaeng, Indonesia. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 277). EDP Sciences.

Harakan, A., Mustari, N., & Abel, A. K. (2021). Sustainable Energy Investment through Paradiplomacy Practices in South Sulawesi, Indonesia. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 277). EDP Sciences.

Hasibuan, M. S. P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hikmawan, R., & Maulida, R. A. (2019). Urgensi City Branding Dalam Paradiplomasi: Studi Kasus Kabupaten Serang. *Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*.

Idah, Y. M., & Pinilih, M. (2020). Strategi Pengembangan Digitalisasi UMKM. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers "Pengembangan Sumber Daya Pedesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX."*

Irdyanti. (2014). Substansi Kerjasama Luar Negeri Sister City Kota Surabaya-Xiamen. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*.

Kambono, H., & Marpaung, E. I. (2020). Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Akuntansi Maranatha*. <https://doi.org/10.28932/jam.v12i1.2282>

Khair, M., & Rusydi, B. U. (2016). Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri (Foreign Debt) Dan Penanaman Modal Asing (Pma) Terhadap Nilai Produk Domestik Bruto (Pdb) Indonesia. *Economics, Sosial, and Development*.

Kurniawan, R. C. (2017). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*.

Lubis, R. P., Firdaus, M., & Sasongko, H. (2015). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Investasi Asing Langsung pada Sektor Perkebunan di Indonesia. *Jurnal Bisnis & Manajemen*. <https://doi.org/10.28932/jam.v12i1.2282>

Ma'ruf, A. (2012). Strategi Pengembangan Investasi Di Daerah Pemberian Insetif Ataukah Kemudahan. 3 (5), 54–57.

Machmud, S. (2015). Kajian Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility

Sebagai Alternatif Sumber Pembangunan Daerah. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*.

Mainita, M., & Soleh, A. (2019). Analisis Investasi Asing Langsung Di Indonesia. *Journal Development*. <https://doi.org/10.53978/jd.v7i2.139>

Malisa, M., & Fakhruddin. (2017). Analisis Investasi Langsung di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah*.

Naranjo, J. (2014). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masuknya Foreign Direct Investment (FDI) Negara Berkembang di Kawasan ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja dan Vietnam) Periode 1995-2014. *Applied Microbiology and Biotechnology*.

Pratiwi, M. A. (2018). Implementasi Manajemen Strategis di Madrasah Aliyah uhammadiyah I Bandar Lampung. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.

Pridayanti, A. (2013). Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2002-2012. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*.

Pujayanti, A. (2016). Peran Daerah dalam Diplomasi Ekonomi. *Politica*.

Purba, B. (2020). Analisis Tentang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2009 – 2018. *Jurnal Humaniora*.

Purwadi, M. A., Halizrianda, Y., & Purba Riani, I. A. (2018). Target Pertumbuhan Investasi Dan Rencana Strategi Pengembangan Investasi Provinsi Papua. *Keuda (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*. <https://doi.org/10.52062/keuda.v3i2.706>

Robby, U. B., & Tarwini, W. (2019). Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online sSingle Submaan (OSS) Studi Pada Izin Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*. 2 (4), 43–45.

Rohmadin, S. (2016). Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Berbasis Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Politik Pemerintahan*.

Sari, A. . (2017). Strategi Komunikasi Public Relations. *Sosial Budaya*.

Sari, H. M., As, A., & Dama, M. (2018). Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Iklim Investasi di Kota Samarinda. *Ilmu Pemerintahan*.

Sudrajat, A. (2008). Pengertian pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik, dan model pembelajaran. Tersedia: [Http://Akhmadsudrajat. Wordpress. Com/2008/09/12/Pengertian-Pendekatan-Strategi-Metode-Tekniktaktik-Dan-Model-Pembelajaran](http://Akhmadsudrajat.Wordpress.Com/2008/09/12/Pengertian-Pendekatan-Strategi-Metode-Tekniktaktik-Dan-Model-Pembelajaran). [20 Oktober 2008].

Sugitono, 2016. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, Alfabeta, cv.

Turcott, S. (2016). In-situ metallography can be a helpful tool in supporting intelligent repair and developing steps to ensure reliability. *Materials Evaluation*.

Varlina, I., & Amar, S. (2019). Pengaruh Investasi Asing (Fdi), Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*.

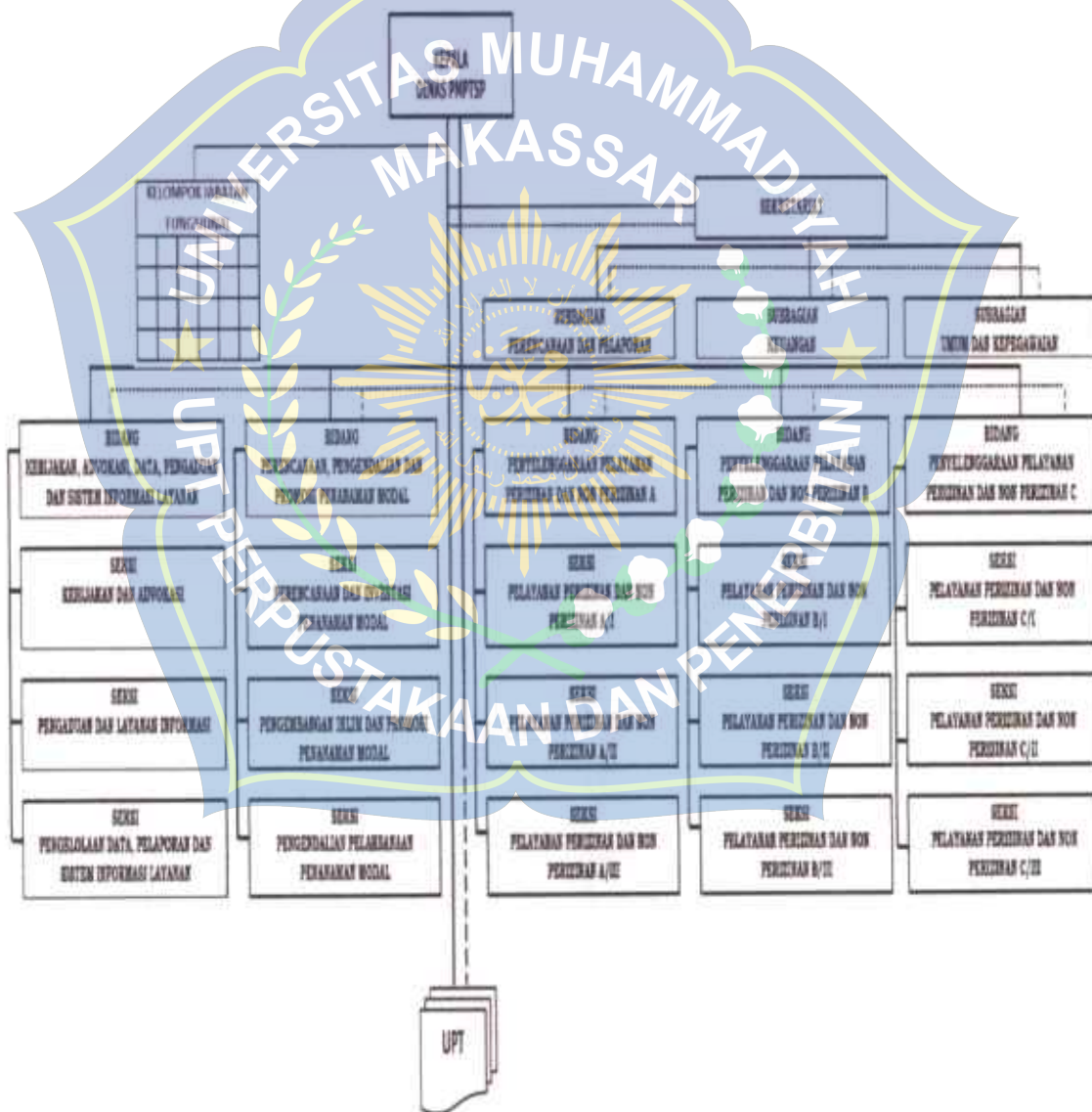
Wedhasmara, a. (2014). Langkah-Langkah Perencanaan Strategis Sistem Informasi dengan Menggunakan Metode Ward and Peppard. *Jurnal Sistem Informasi*.



Lampiran 1

STRUKTUR DPM-PTSP

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU



Lampiran 2**Pedoman wawancara**

1. Bagaimana bentuk strategi organisasi dalam pelaksanaan para diplomasi dalam meningkatkan investasi asing?
2. Bagaimana pendelegasian tugas dari puncak atas hingga bawah sehingga dapat terkoordinasi?
3. Apakah struktur organisasi yang telah dibentuk sudah berjalan dengan efektif dalam meningkatkan investasi asing?
4. Bagaimana bentuk pemahaman aparaturnya terhadap program-program yang telah ditetapkan dalam meningkatkan investasi asing?
5. Apa saja program-program yang berkaitan dengan paradiplomasi dalam meningkatkan investasi asing?
6. Apakah program yang sudah ada berjalan efektif dalam meningkatkan investasi asing di Kota Makassar?
7. Bagaimana pola pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia dalam ruang lingkup dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu guna meningkatkan kapasitas aparaturnya dalam pelaksanaan paradiplomasi?
8. Apa saja program-program yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia?
9. Bagaimana pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung kualitas sumber daya yang dimiliki?
10. Bagaimana bentuk strategi kelembagaan dalam meningkatkan paradiplomasi di Kota Makassar?
11. Bagaimana bentuk kewenangan dinas dalam pelaksanaan paradiplomasi?
12. Bagaimana bentuk koordinasi antar lembaga dalam meningkatkan investasi asing di Kota Makassar?

Lampiran 3

No	Nama Perusahaan	Sektor	Tahap periode	Tambahan Investasi (Dalam Rp. Juta)	Tambahan Investasi (Dalam us\$. Ribu)	Proyek	TKI	TKA	Status	Triwulan
1	PT. ELNUSA PETROFIN	Pertambangan	PRODUKSI	9	1	1	0	0	PMDN	TW 2 2021
2	PT. ERGUSA RESOURCES	Pertambangan	KONSTRUKSI	289	19	1	50	0	PMDN	TW 2 2021
3	PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK	Industri Makanan	PRODUKSI	-	-	1	0	0	PMDN	TW 2 2021
4	PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKAMUR TBK	Industri Makanan	PRODUKSI	-	-	1	0	0	PMDN	TW 2 2021
5	PT. INTI CELEBES CITRA RASA	Industri Makanan	PRODUKSI	-	-	1	0	0	PMDN	TW 2 2021
6	PT. INTI CELEBES CITRA RASA	Industri Makanan	PRODUKSI	-	-	1	0	0	PMDN	TW 2 2021
7	PT. INTI CELEBES CITRA RASA	Industri Makanan	PRODUKSI	-	-	1	0	0	PMDN	TW 2 2021
8	PT. JAPFA COMFEED INDONESIA TBK	Industri Makanan	PRODUKSI	-	-	1	0	0	PMDN	TW 2 2021
9	PT. KILANG NABATI TERPADU	Industri Makanan	PRODUKSI	-	-	1	0	0	PMDN	TW 2 2021
10	PT. KILAT AGROTAMA UNGGUL	Industri Makanan	PRODUKSI	-	-	1	0	0	PMDN	TW 2 2021
11	PT. KILAT AGROTAMA UNGGUL	Industri Makanan	PRODUKSI	-	-	1	0	0	PMDN	TW 2 2021
12	PT. KILAT AGROTAMA UNGGUL	Industri Makanan	PRODUKSI	-	-	1	0	0	PMDN	TW 2 2021
13	PT. KILAT AGROTAMA UNGGUL	Industri Makanan	PRODUKSI	-	-	1	0	0	PMDN	TW 2 2021
14	PT. LUXOR	Industri Makanan	PRODUKSI	11	1	1	0	0	PMDN	TW 2 2021
15	PT. PANGAN LESTARI SEJAHTERA	Industri Makanan	KONSTRUKSI	-	-	1	0	0	PMDN	TW 2 2021
16	PT. PERKASA AGUNG SEJATI	Industri Makanan	PRODUKSI	788	54	1	0	0	PMDN	TW 2 2021
17	PT. PERKASA AGUNG SEJATI	Industri Makanan	PRODUKSI	300	21	1	0	0	PMDN	TW 2 2021
18	PT. PRIMA BAHARI INTI LESTARI	Industri Makanan	PRODUKSI	-	-	1	3	0	PMDN	TW 2 2021

19	CV. SINAR AGUNG	Industri Makanan	KONSTRUKSI	2.400	164	1	0	0	PMDN	TW 2 2021
20	PT. TIRTA MULIA ABADI	Industri Makanan	KONSTRUKSI	1.900	130	1	15	0	PMDN	TW 2 2021
21	CV. SINAR AGUNG	Industri Makanan	KONSTRUKSI	1.890	123	1	0	0	PMDN	TW 2 2021
22	PT. KATINGAN TIMBER CELEBES	Industri Kayu	PRODUKSI	-	-	1	0	0	PMDN	TW 2 2021
23	PT. AKSARA GRAFIKA, MAKASSAR	Industri Kertas dan Peretakan	KONSTRUKSI	-	-	1	0	0	PMDN	TW 2 2021
24	CV. BULAN BINTANG	Industri Kimia Dan Farmasi	KONSTRUKSI	4.000	274	1	0	0	PMDN	TW 2 2021
25	PT. TAWON JAYA MAKASSAR	Industri Kimia Dan Farmasi	PRODUKSI	-	-	1	0	0	PMDN	TW 2 2021
26	PT. CAHAYA DINAMIKA PERSADA	Industri Karet dan Plastik	PRODUKSI	-	-	1	0	0	PMDN	TW 2 2021
27	PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK	Industri Karet dan Plastik	PRODUKSI	-	-	1	0	0	PMDN	TW 2 2021
28	PT. BUMI SARANA BETON	Industri Mineral Non Logam	KONSTRUKSI	5.400	370	1	0	0	PMDN	TW 2 2021
29	PT. BUMI SARANA BETON	Industri Mineral Non Logam	KONSTRUKSI	4.796	328	1	0	0	PMDN	TW 2 2021
30	PT. CATUR JAYA TRUSS	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	PRODUKSI	-	-	1	0	0	PMDN	TW 2 2021
31	PT. GRAHA BINTANG METALINDO	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	PRODUKSI	-	-	1	0	0	PMDN	TW 2 2021
32	PT. GRAHA BINTANG METALINDO	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	PRODUKSI	-	-	1	0	0	PMDN	TW 2 2021
33	PT. TATALOGAM LESTARI	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	PRODUKSI	-	-	1	0	0	PMDN	TW 2 2021
34	PT. KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Lain	KONSTRUKSI	851	58	1	0	0	PMDN	TW 2 2021

Lampiran 4

Surat Izin Penelitian

 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 14953/S.01/PTSP/2021
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Walikota Makassar

Gd.
 Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2157/05/C.4-VIII/V/20/2021 tanggal 22 Mei 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/pemelo dibawah ini:

Nama : **ANDI IRWANDI**
 Nomor Pokok : 105641107216
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. Sri Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan skripsi, dengan judul:

" STRATEGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) DALAM PENINGKATAN INVESTASI ASING MELALUI PARADIPLOMASI DI KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 31 Mei s/d 31 Juli 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 25 Mei 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
 Pangkat : Pembina Tk.I
 Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth.
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar & Makassar
 2. Penerima

DISAMP PTSP 25-05-2021



Jl. Bougainville No 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448636
 Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231













Riwayat Hidup



Andi Irwandi, Lahir di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Pada tanggal 20 November 1998. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dan buah hati dari pasangan suami istri bapak Andi Muhammad Syukur dan Ibu A. Rohani.

Penulis mengawali pendidikan di bangku taman kanak-kanak (TK) Handayani pada tahun 2002 sampai tahun 2004, melanjutkan pendidikan sekolah dasar (SD) SDN 240 Tellu Boccoe pada tahun 2004 sampai dengan 2010, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 1 Mare dan tamat pada tahun 2013 penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Mare yang sekarang berubah menjadi SMA Negeri 2 Bone dengan mengambil konsentrasi IPS pada tahun 2013 dengan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis dinyatakan lulus sebagai mahasiswa program studi ilmu pemerintahan, jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selain aktif kuliah penulis juga aktif di beberapa lembaga kampus sejak tahun 2017 tercatat sebagai wakil ketua umum Himpunan Mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan periode 2018-2019, bersama anggotanya penulis berhasil melaksanakan kongres forum besar FokkerMapi se Sul-Sel selain itu penulis juga tercatat sebagai anggota BPR UKM Seni dan Budaya Talas, dan menjadi ketua bidang organisasi DPK Kepmi Bone Taro Ada Taro Gau Unismuh Makassar.